

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

SEPTIA NINGRUM

C100140145

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

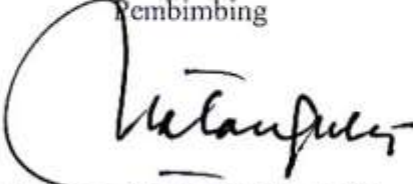
PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus di KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:
SEPTIA NINGRUM
C.100.140.145

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing

(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)
NIK. 536/NIDN.0625045901

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)

Yang ditulis oleh :

Septia Ningrum
C100140145

Telah dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2018

Dewan Penguji

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muchammad Iksan S.H, M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto S.H, M.H**
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

Surat Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diatur dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Juni 2018

Yang menyatakan



Septia Ningrum
C100140145

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)**

Abstrak

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu upaya diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan. Sedangkan proses penerapan diversi dilakukan oleh penyidik dengan musyawarah atau mediasi terhadap para pihak sampai terbentuknya suatu kesepakatan diversi yang disetujui oleh para pihak. Adapun hambatan yang timbul dalam melakukan penelitian kasus dapat dibagi menjadi lima faktor: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana salah satu jalannya dengan menggunakan diversi karena diversi merupakan cara untuk melindungi HAM yang dimilikinya.. Penganiayaan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab penganiayaan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan.

Abstract

Diversion Implementation Of Children In Dealing With The Law In The Crime Of Abuse (Case Study In Resort City Police Surakarta). Legislation of act No. 12 of 2012 on the Criminal Justice System Child and PERMA No. 4 of 2014 on Guidelines for Diversion in the Criminal Justice System Child ie diversion efforts done at any level of inspection, both at the level of investigation, prosecution and at the court level. While the process of implementing the diversion conducted by investigators with the consultation or mediation to the parties until the formation of a diversion agreement agreed to by the parties. As for the obstacles that arise in conducting a case study can be divided into five factors: factors legislation, law enforcement apparatus, means or facility factors, community factors, and cultural factors. In its development, the protection of children in conflict with the law,

Keywords : Diversion, Children, Crime of Torture.

1. PENDAHULUAN

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak

anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi.

Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, yang berarti untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan hukuman yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukannya.¹

Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama *Restorative Justice* atau diversifikasi (pengalihan). Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya *diversi* sungguhlah tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya pidana pembedaan, agar hak-hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta? (2) Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam hal Proses Diversifikasi?

¹ Setya Wahyudi, 2011, "Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 2

(3) Bagaimanakah Upaya Supaya Anak Tidak Mengulangi Tindak Pidana Penganiayaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk memenuhi prasyarat gelar sarjana hukum. (2) Untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta. (3) Untuk mengetahui Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam hal Proses Diversi. (4) Untuk mengetahui upaya agar anak tidak mengulangi tindak pidana penganiayaan dikemudian hari.

Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua yang membaca mengenai bagaimana implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penyelidikan di Kepolisian terutama di Kepolisian Resor Kota Surakarta. (2) Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

Kerangka dari penelitian ini yaitu Pengertian keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak..² Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.³ Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁴

² Dwidja Priyatno, 2006, *"Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama, hal. 14

³ Marlina, 2009, *"Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Bandung: Refika Aditama, hal. 22

⁴ Nandang Sambas, 2010, *"Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 22

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris.⁵ Sedangkan jenis penelitiannya deskriptif.⁶ Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dengan pihak Kepolisian dan data sekunder berupa buku-buku, undang-undang dan literatur-literatur yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dari bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Proses Diversi di Unit PPA dalam Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Surakarta.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi diversi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta

3.1.1 Implementasi Diversi Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berlaku

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus Tindak Pidana penganiayaan dan Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni: (1) Secara non penal. Di dalam proses ini pihak Kepolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. (2) Secara Penal. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 7 menjelaskan bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan *diversi* baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan

⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61.

⁶ Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

pemeriksaan perkara. Pengertian penyidikan dapat kita uraikan atau jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁷

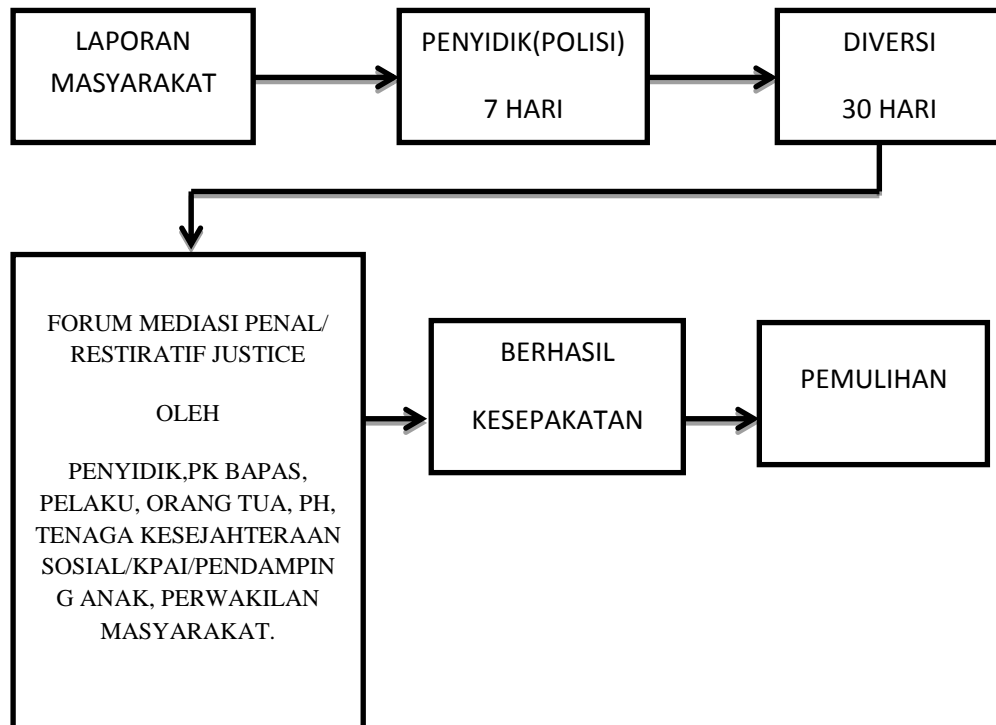
Penerapan Diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:⁸ (1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat (2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya. (3) Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku. (4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Terdapat tahap-tahapan dalam pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu:⁹ (a) Tahap pelaksanaan diversi dalam proses penyidikan. (b) Tahap pelaksanaan diversi dalam proses penuntutan. Pada tahap penuntutan ini penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi akan dilakukan musyawarah. (c) Tahap pelaksanaan diversi dalam proses persidangan. Skema tahap proses diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

⁷ Yahya Harahap, 2005, "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*", Jakarta: Sinar Grafika, hal. 109.

⁸ Kelik Pramudya, 2013, "*Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)*" ,Jurnal Rechts Viding, Vol.2 No.2,hal.225. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html> Diunduh Kamis 22 Februari 2018 Pukul 19.06 WIB.

⁹ Angger Sigit Pramukti&Fuady Primaharsya, 2015, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal.70



Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan diversi

Berdasarkan skema/bagan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut; adanya laporan masyarakat terjadinya tindak pidana ke kantor polisi setempat. Sejak dalam tahap masuknya perkara anak, penyidik telah dapat melakukan *diversi*, baik penyidik sebagai penegak (*law enforcement*), maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, penganyoman masyarakat (*non law enforcement sources*).¹⁰ Penyidik wajib mengupayakan *diversi* selama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Apabila *diversi* dapat dilakukan oleh para pihak maka dilakukan proses *diversi* selama 30 hari sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012. Dalam tingkat penyidikan proses *diversi* dilakukan suatu musyawarah atau forum mediasi *penal*. Setelah semua dirasa cukup, maka penyidik melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan proses *Diversi*. Hasil yang dicapai adalah sepakat bahwa pihak pelaku mengganti biaya ganti rugi.

¹⁰ Setya Wahyudi, 2011, "*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Yogyakarta:Genta Publishing, hal.74

3.1.2 Implementasi Diversi Dalam Ranah Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta

Pelaksanaan diversi bagi Kepolisian disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pegalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan Diversi atau Restorative di Polresta Surakarta:¹¹ (a) Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu. (b) Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban. (c) Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya. (d) Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS Surakarta. (e) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, pihak penyidik PPA Polresta Surakarta akan memanggil kedua belah pihak, yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan Diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Wahyu Riyadi, S.H selaku penyidik dari Unit PPA Polresta Surakarta, mengatakan bahwa adanya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam hal dilakukan proses diversi, dalam kasus tersebut MN diduga melanggar Pasal 80 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/B/195/IV/2017/Jateng. Res. Ska, tertanggal 13 April 2017. Karena ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UURI No. 11 Tahun 2012 berbunyi: “Pada Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Menurut hasil wawancara dengan Iptu Wahyu Riyadi, S.H selaku penyidik dari Unit PPA Polresta Surakarta, manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam

¹¹ Iptu Wahyu Riyadi, Penyidik Unit PPA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Mei 2018, pukul 13:00WIB

pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja.¹²

Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Surakarta akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS.¹³

Selain itu hambatan penerapan proses diversi menurut Iptu Wahyu Riyadi, S.H selaku penyidik dari Unit PPA Polresta Surakarta, ialah sebagai berikut:¹⁴ (1) Ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif atau proses diversi. (2) Pandangan dari masyarakat mengenai penerapan proses diversi ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana, karena adanya rasa dendam. (3) Ketika melakukan proses diversi ini sering dijadikan anjang tawar menawarkan ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. (4) Adanya hambatan saat dilakukannya eksekusi.

Melihat terdapat berbagai macam kendala-kendala dalam penerapan Diversi secara umum seperti di atas. Kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Mulai dari aspek hukum yang sudah mengatur untuk dilakukan Keadilan *Restorative* atau *Diversi* dalam menangani kasus tindak pidana dengan anak (Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi Sistem

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid.

Peradilan Pidana Anak, serta dari aspek Penegak hukumnya dan dari aspek Sarana dan Prasarana.

3.2 Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam hal Proses Diversi

3.2.1 Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.”

Melihat kepada pasal tersebut sangat jelas bahwa hak anak yang juga merupakan seorang manusia yang memiliki HAM telah diakomodir di dalamnya. Hal ini berarti juga dalam hal pengimplementasian konsep diversi, Negara Indonesia juga telah memberikan perlindungan terhadap HAM dan kebebasan manusia tanpa adanya diskriminasi. Anak berhak dilindungi terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana salah satu jalannya dengan menggunakan diversi karena diversi merupakan cara untuk melindungi HAM yang dimilikinya.

3.2.2 Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam hal Proses Diversi Menurut PPA Polresta Surakarta

Dalam kasus tindak pidana peganiayaan yang dilakukan oleh MN, bahwa MN sebagai pelaku juga harus dilindungi hak-hak dari MN yang dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan, asuhan, dan

pengawasan dari orangtuanya, anak masih ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, anak mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter yang dimana akan diraihinya, anak masih perlu teman sepermainan yang sebaya agar tumbuh dan berkembang sebagai mana anak-anak seusianya. Pada waktu melakukan kekerasan terhadap korban MN karena emosi dan MN masih berstatus anak, maka dengan menyerahkan kembali kepada orang tua, akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak lebih ke arah positif dari pada harus dipidana di Rutan atau Lapas.

Dari kasus diatas berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.”

Implementasi diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pemenuhan HAM dan Hak Anak yang berdaulat dan adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan saling memaafkan dalam proses diversi, anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlepas dari rasa diskriminasi dan timbul efek jera dalam hatinya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3.2.3 Upaya Supaya Anak Tidak Mengulangi Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam upaya menanggulangi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak di daerah Surakarta, Kepolisian melakukan upaya-upaya yaitu melalui upaya pre-emptif dan upaya represif yang dilakukan pihak PPA Polresta Surakarta anatara lain sebaga berikut: *Pertama*, upaya pre-emptif antara lain; (a) Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga lingkungannya. (b)Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Surakarta tentang bahaya kekerasan serta sangsi Pidananya. (c) Menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor apabila terjadi hal yang mencurigakan yang mengindikasikan akan terjadinya perkelahian antar pelajar. (d)Menghimbau kepada masyarakat yang khususnya orang tua agar memantau pergaulan anak di luar sekolah. (e) Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh agama serta lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan ketiap-tiap Sekolah maupun lingkungan masyarakat yang berada di Kota Surakarta.

Kedua, upaya preventif yaitu upaya-upaya yang dilakukan kepolisian untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kekerasan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, pihak kepolisian sendiri telah melakukan patroli setiap jam istirahat ataupun setelah pulang sekolah serta selalu mengawasi tempat-tempat yang rawan akan tawuran ataupun pembacokan yang dilakukan oleh pelajar.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan Diversi atau Restorative di Polresta Surakarta: (a) Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu, (b) Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban, (c) Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya, (d) Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS Surakarta, (e) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, pihak penyidik PPA Polresta Surakarta akan memanggil kedua belah pihak. Yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan Diversi.

Dalam kasus tersebut MN diduga melanggar Pasal 80 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/B/195/IV/2017/Jateng. Res. Ska, tertanggal 13 April 2017. Karena ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UURI No. 11 Tahun 2012 berbunyi: *“Pada Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”*.

Kedua, perlindungan hukum terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu implementasi diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pemenuhan HAM dan Hak Anak yang berdaulat dan adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan saling memaafkan dalam proses diversi, anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlepas dari rasa

diskriminasi dan timbul efek jera dalam hatinya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Ketiga, upaya menanggulangi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak di daerah Surakarta, Kepolisian melakukan upaya-upaya yaitu melalui upaya pre-emptif (upaya setelah terjadi perbuatan) dan upaya represif (upaya-upaya yang dilakukan kepolisian untuk upaya pencegahan) yang dilakukan pihak PPA Polresta Surakarta.

4.2 Saran

Pertama, kepada Kepolisian, perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan *Restorative Justice* dan pentingnya kesejahteraan melindungi hak anak dengan proses diversi.

Kedua, kepada Polisi seharusnya lebih jeli dalam melakukan penanganan perkara anak serta lebih memahami latar belakang kondisi anak tersebut.

Ketiga, kepada Polisi dan Orang tua, sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan terhadap anak agar faktor-faktor tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berkurang.

Keempat, kepada Polisi, LSM, BAPAS dan pihak lain yang selalu terlibat dalam penanganan perkara anak baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana saya harap selalu lindungi hak-hak dan kesejahteraan anak karena anak ialah generasi penerus bangsa dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirydin dan Asikin,Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma,Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,Bandung:Mandar Maju*.

Harahap,Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina,2009,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*,Bandung:Refika Aditama.

- Pramukti, Angger Sigit & Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

JURNAL

- Pramudya, Kelik, 2013, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators and Victim in Restorative Justice)*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.2 No.2, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>, Diakses Kamis 22 Februari 2018 Pukul 19.06 WIB.